

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS/PPAT TERHADAP PEMBUATAN  
AKTA JUAL BELI BERDASARKAN PEMALSUAN SURAT SECARA BERSAMA-  
SAMA DENGAN PARA PIHAK**

**(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2013/PN.Pdg)**

**TESIS**

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan  
untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan*



**Disusun Oleh :**

**GEMALA PRATIWI TOHAB, S.H**

**NIM. 1420122028**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Elwi Danil., SH., MH**

**Dr. Azmi Fendri., SH., M.Kn**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2017**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS/PPAT TERHADAP PEMBUATAN  
AKTA JUAL BELI BERDARAKAN PEMALSUAN SURAT SECARA BERSAMA-  
SAMA DENGAN PARA PIHAK**

**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) maupun dalam Undang-Undang Nomor 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Perubahan Atas UJN) belum mengatur keberadaan sanksi hukum pelanggaran terhadap Pasal 15 UJN dalam kaitannya dengan aspek pidana dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya pemalsuan surat atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai tanggungjawab notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, dan apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif yang berangkat dari kekosongan norma. Sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum yang terkumpulkan selanjutnya disistematisasi, dianalisis, dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas kedua permasalahan yang dibahas pada tesis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun tanggungjawab notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta notaris menurut UJN dan UU Perubahan atas UJN adalah ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris bertanggungjawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggungjawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UJN dan Kode Etik, namun di dalam UJN tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan para pihak menjadi tanggungjawab para pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris adalah apabila penipuan atau pemalsuan dokumen tersebut bersumber dari notaris itu sendiri.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, akta jual beli, dan pemalsuan surat

# **THE CRIMINAL RESPONSIBILITY OF NOTARY/PPAT ON CASE DEED OF SALE AND PURCHASE BASE ON LETTER FORGERIES ALTOGETHER WITH THE PARTIES**

## **ABSTRACT**

Law No. 30 of 2004 (UUJN) as well as in Law No. 2 of 2014 about Amendment of Notary position law (UUJN Amendment) have not set the presence of legal sanctions on delinquency of article 15 of the UUJN Amendment in relation to the criminal aspect which is when the notary is not applying the article provisions will lead to the acts of falsifying letters or certificates as referred in article 263,264, and 266 of the Criminal Code (KUHP) that will give disadvantage to the concerned parties. Therefore, this study attempts to analyze and answer issues concerning the responsibility of a notary in the case of letter forgeries committed by the parties on making deed according to the Notary Law. And could notary be held for accountability when there are disadvantages of either party as a result of false documents from other party. This research qualified as a normative legal research that starts from the nonexistent norm. The research source was obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Legal materials that have been gathered up later been systematized, analyzed and given argumentation to obtain conclusions on the issues discussed in this thesis. The research result showed that responsibility of Notary in case of letter forgeries committed by the parties to make notary deed according to UUJN and UUJN Amendment is when the notary running their duty proved to have violated, notary is responsible in accordance with the action in terms of accountability of the Administrative Law. Civil Law, which is in accordance with the sanction provision set forth in Article 84 and 85 of UUJN Amendment and code of ethics, but in UUJN and UUJN Amendment did not yet provide criminal sanctions. In practice it is found the fact that this violation is classified as a crime act committed by a Notary. Notaries can not be held responsible for the documents from other party, because notary only record what was presented by the parties to be poured into the deed. False information that submitted by the parties is the responsible of parties. In other words, which can be accounted for by notary is fraud or trickery when it comes from notary own.

Keyword : Criminal Responsibility, Deed of sale and purchase, and Letter forgeries.